

## DAFTAR PUSTAKA

- Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik." Jakarta, 2005. dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_rpp\\_transaksi\\_elektronik.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_rpp_transaksi_elektronik.pdf), diakses pada tanggal 10 Januari 2020;12.30 WIB..
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. "Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Jakarta, 2010. dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas\\_uu\\_no.11\\_tahun\\_2008.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008.pdf), diakses pada tanggal 10 Januari 2020;13.00 WIB.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. "Elektronik." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.05 WIB.
- . "Informasi." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.04 WIB.
- . "Kebal." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kebal>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.01 WIB.
- . "Kepentingan." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kepentingan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.07 WIB.
- . "Masih." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masih>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.03 WIB.
- . "Memperbaiki." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Memperbaiki>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.13 WIB.
- . "Mencabut." KBBi Daring, 2019. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mencabut>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.11 WIB.
- . "Objektif." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Objektif>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.09 WIB.
- . "Pers." KBBi Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;10.00 WIB.

- . “Ralat.” KBBI Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Ralat>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.12 WIB.
- . “Terus.” KBBI Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Terus>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.02 WIB.
- . “Transaksi.” KBBI Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.06 WIB.
- . “Umum.” KBBI Daring, 2020. dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Umum>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.08 WIB.
- Bangun, Henry CH. “Ada Apa Dengan Siber?” *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 46.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press-PMM, 2009.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi))*. 1 ed. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Cohen, Morris I. *Sipnopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research in a Nutshell)*. Diedit oleh Ibrahim. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Currant, James, dan Michael Gurevitch. *Mass Media and Society*. 2 ed. London-New York: Arnold, 1997.
- Davis, Gordon B., dan Margareth Olson. *Management Information System: Conceptual Foundations, Structure and Development*. New York: McGraw-Hill, 1987.
- Dewan Pers. “Apa yang dimaksud dengan Hukum Pers?” Dewan Pers, 2020. dalam <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/340>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.30 WIB.
- . “Asosiasi Perusahaan Pers.” Dewan Pers, 2020. dalam [https://dewanpers.or.id/data/asosiasi\\_perusahaan\\_pers](https://dewanpers.or.id/data/asosiasi_perusahaan_pers), diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.40 WIB.
- . “Dalam pengertian Pers terdapat kata semua saluran komunikasi yang tersedia. Apakah dengan demikian semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia termasuk Pers?” Dewan Pers, 2020. dalam <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/340>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 10.50 WIB.
- . “Lembaga.” Dewan Pers, 2019. dalam <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020; 11.00 WIB.
- . “Organisasi Wartawan.” Dewan Pers, 2020. dalam

<https://dewanpers.or.id/data/organisasi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020;11.15 WIB.

- Edy, Susanto, Mohammad Taufik Makarao, dan Hamid Syamsudin. *Hukum Pers di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Gijssels, Jan, dan Mark Van Hoecke. *Wat is Rechtsteorie?* Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschap, 1982.
- H. Soebagijo, I. N. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Hamidy, H. M. *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*. Almanak Antara, 1979.
- Heryansyah, Tedy Rizkha. “Mengenal Contoh Kalimat Opini.” ruang guru, 2017. <https://blog.ruangguru.com/mengenal-contoh-kalimat-opini>.
- Huda, Chairul. “Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dan Pemakaiannya dalam Praktek Pers.” *Jurnal Dewan Pers* 2, no. 11 (2010): 38–39.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019).
- . Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 PK/PDT/2008 (2008).
- . Putusan No. 225 PK/PID.SUS/2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2012).
- . Putusan No. 300 K/Pdt/2010, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2010).
- . Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST (2000).
- . Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 42 / Pid. B / 2011 /PN.Kds, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011).
- . Putusan Sela Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bir, Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. 7 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Komala, Ratna. “Gonjang Ganjing Dinamika Profesi Wartawan di Indonesia.” *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 9.
- Kusumaningrat, Hikmat, dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Lamintang, F. A. P. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Lubis, T. Mulya, dan Fauzi Abdullah. *Langit Masih Mendung, Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

- M. Ramli, Ahmad, Pager Gunung, dan Indra Apriadi. *Menuju Kespastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*. 3 ed. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 (2009).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Manan, Bagir. *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Diedit oleh Samsuri dan Herutjahjo. 1 ed. Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Merril, John C. *Journalism Ethics-Philosophical Foundations for News Media*. New York: St. Martin's Press, 1997.
- Meuwissen, D. H. M. *Ilmu Hukum*. Diedit oleh B. Arief Sidharta, dalam Pro Justitia, dan Tahun XII Nomor 4, 1994.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Graffiti, 2001.
- Partodihardjo, Soemarno. *Tanya Jawab Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Prasetyo, Yosep Adi. "Abal-Abalisme Sebagai Musuh Kemerdekaan Pers." *Jurnal Dewan Pers* 18, no. 11 (2018): 4.
- . "Kebebasan Pers Untuk Demokrasi." *Dewan Pers* 12, no. 9 (2016): 5–6.
- Rachmadi, R. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Republik Indonesia. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi War (2017).
- . Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (2017).
- . Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers (2008).
- . Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers (2008).
- . Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (2008).



- . Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. PP No. 71 Tahun 2019, LN. No. 185, TLN No. 6400 (2019).
- . Perpres tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Pub. L. No. Perpres No. 43 Tahun 2018, LN No. 83 (2018) (2018).
- . Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 04/SK-DP/III/2006 tentang Standar Organisasi Wartawan (2006).
- . Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 (2016), TLN No. 5952 (2016).
- . Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pub. L. No. UU No. 16 Tahun 2004, LN. No. 67 (2004), TLN. 4401 (2004).
- . Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, Pub. L. No. UU No. 22 Tahun 2001, LN No. 136, TLN No. 4152 (2001).
- . Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82, TLN No. 5234 (2011).
- . Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pub. L. No. UU No. 2 Tahun 2012, LN. No. 22 (2012), TLN No. 5280 (2012).
- . Undang-Undang tentang Penyiaran, Pub. L. No. UU No. 32 Tahun 2002, LN. No. 139 (2002), TLN. No. 4252 (2002).
- . Undang-Undang tentang Pers, Pub. L. No. UU No. 40 Tahun 1999, LN No. 166 (1999), TLN No. 3887 (2009).
- Reza, M. “Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegek Hukum Periksa Adik Bupati Dalam Kasus Minyak Subsidi.” *Media Realitas*. 26 Agustus 2018. <https://mediarealitas.com/2018/08/anggota-bireuen-suhaimi-minta-penegek-hukum-periksa-adik-bupati-dalam-kasus-minyak-subsidi/>.
- . “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa.” *Media Realitas*. 25 Agustus 2018. <https://mediarealitas.com/2018/08/merasa-kebal-hukum-adik-bupati-bireuen-diduga-terus-gunakan-minyak-subsidi-untuk-perusahaan-raksasa/>.
- Sadono, Bambang. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Sanusii, M. Arsyad. *Hukum dan Teknologi Informasi*. 3 ed. Jakarta: Tim KemasBuku, 2005.
- Siebert, F, T Peterson, dan Wilbur Schramm. *Four Theories of The Press*. III. Urbana, 1956.
- Smith, Edward C. *Sejarah Pemberedelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*. 15 ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukardi, Wina Armada. "Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah." *Jurnal Dewan Pers* 2, no. 11 (2010): 23.
- Surjomiharjo, Abdurrahman, ed. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pengembangan Deppen dan LEKNAS LIPI, 1980.
- Wiryawan, Hari. *Dasar-Dasar Hukum Media*. Diedit oleh Muammar Ramadhan. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.